



RENCANA KERJA 2019

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA 2019

RENCANA KERJA 2019

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, yang memuat kinerja program dan anggaran untuk memenuhi sasaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019.

Rencana Kerja 2019 ini memuat hasil hasil diskusi dalam berbagai forum yang secara resmi diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seluruh foto adalah aktifitas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 s/d 2018

Foto Dokumentasi
Taman Nasional Way Kambas

Foto Sampul
Taman Nasional Waykambas

Dokumen ini dapat di unduh melalui tautan:



<http://bit.ly/RENJAGAKKUM2019>



BAB I PENDAHULUAN

	Hal
Latar Belakang	1
Nawacita	2
Komitmen Negara	3
Prioritas Nasional	4
Program Prioritas	5
Kegiatan Prioritas	6
Proyek Prioritas Nasional	8
Tujuan dan Sistematika	9
Latar Belakang K/L	10
Indikator Kinerja Utama	11
Indikator Kinerja Program	12
Kondisi,Isu dan Tipologi	14
Tujuan Strategis	15
Peta Strategi	16
Kedudukan, Tugas dan Fungsi	17
Struktur Organisasi	18
Pengarusutamaan	19
Gender	
Peluang dan Tantangan	20
Multi Instrumen GAKKUM	22
Penguatan Kapasitas	23
Kerja Kerja Gakkum LHK	24

BAB II CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS

	Hal
Capaian & Prognosis Kinerja Program 2015 s.d 2019	25
Prognosis Capaian Anggaran Program 2015 s/d 2019	26
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2015 s/d 2019	27
Prognosis Kinerja Kegiatan dan Anggaran TA 2018	35

BAB III RENCANA KERJA 2019

	Hal
Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	43
Penguatan Sistem Perizinan , Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	43
Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	43
Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Non Prioritas Nasional	44
	45

BAB IV PENUTUP

	Hal
Kata Penutup	46

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	Hal
Rencana Kerja 2019	
Peraturan Direktur Jenderal	i
Daftar Isi	ii
Pranala	
LAMPIRAN	
LAMPIRAN	
	Hal
Capaian Kinerja 2015 s.d 31 Desember 2018	47
Data Terpilah SDM	49
Kerangka Pendanaan	50
Anggaran Prioritas Nasional	54
Target Indikator Kinerja Program	55
Distribusi Target per Output Prioritas Nasional TA 2019	56
Target dan Indikator Kinerja Eselon II	57
Target dan Indikator Kinerja UPT	62
	65
Perjanjian Kinerja TA 2019	67
Barcode Unduhan	





P R A N A L A

Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan Ditjen GAKKUM KLHK dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 serta Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Rasio Ridho Sani





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No: P.4/PHLHK/SET/SET.1/9/2018

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

- Merasang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu disusun dan dilaksanai Rencana Kerja Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SET/DIR/2015 tentang Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, dilaksanakan Rencana Kerja Tahunan Eselon I dan Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengesahan Konvensi Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Marnata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/10/M/PAN/1/2006 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MEN/1/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MEN/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MEN/1/2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/MEN/1/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MEN/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);

21. Peraturan Menteri...

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2018 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1850);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 521);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 tentang Peningkatan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 642);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 740);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1103);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.57/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi Dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1639);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2015 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1080);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
31. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.4/PHLHK-SETDIT/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA, DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan untuk Pegawai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPH LHK);
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 10 September 2018

DIREKTUR JENDERAL



RASIO RIDHO SANI
NIP.19600711 199203 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.4/PHLHK/SET/SET.1/9/2018
TANGGAL : 10 September 2018

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019



B A B I

P E N D A H U L U A N



Gakkum KLHK Mengamankan 40 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua Barat

“Hasil operasi ini adalah bukti keseriusan KLHK memberantas pembalakan liar mulai dari hulu hingga hilir. Pemberantasan yang komprehensif bisa menjadi sinyal yang kuat buat para perusahaan penadah kayu ilegal dari Papua agar menghentikan usaha ilegal itu,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum KLHK. “Penting menyelamatkan sumber daya alam Papua,” lanjut Rasio Ridho Sani. (04/12/2018)





L A T A R B E L A K A N G

PRESIDEN JOKO WIDODO



1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong ”



AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Agenda Nomor 4 : Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi system dan Penegakan Hukum yang berkeadilan;

- Sub Agenda: Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- Sub Agenda: Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar dan Penambangan Liar;

Agenda Nomor 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

- Sub Agenda : Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;





N A W A C I T A



Gambar. 5 - Nawacita 4 Kepastian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem;



K O M I T M E N N E G A R A

KOMITMEN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP & SUMBER DAYA ALAM



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia



Memajukan kesejahteraan umum



Mencerdaskan kehidupan bangsa



Ikut melaksanakan ketertiban dunia



"Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3



"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

- Pasal 28 H UUD 1945



"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4



"Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik administrasi, perdata atau pidana...Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat."

Presiden Joko Widodo, Ratas Karhutla (12 Agustus 2016)

MANDAT PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN



UU 5/1990 Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya



UU 18/2008 Pengelolaan Sampah



UU 18/2013 P3H



UU 8/2010 Pencegahan & Pemberantasan TPPU



UU 39/2014 Perkebunan



UU 41/1999 Kehutanan



UU 32/2009 Perlindungan & Pengelolaan LH



UU 37/2014 Konservasi Tanah & Air



UU 4/2009 Mineral & Batubara



UU 26/2007 Penataan Ruang



UU 27/2007 jo. UU 1/2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



P R I O R I T A S N A S I O N A L

PRIORITAS NASIONAL 4 : PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR

PN 2 Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman



PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS



PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar



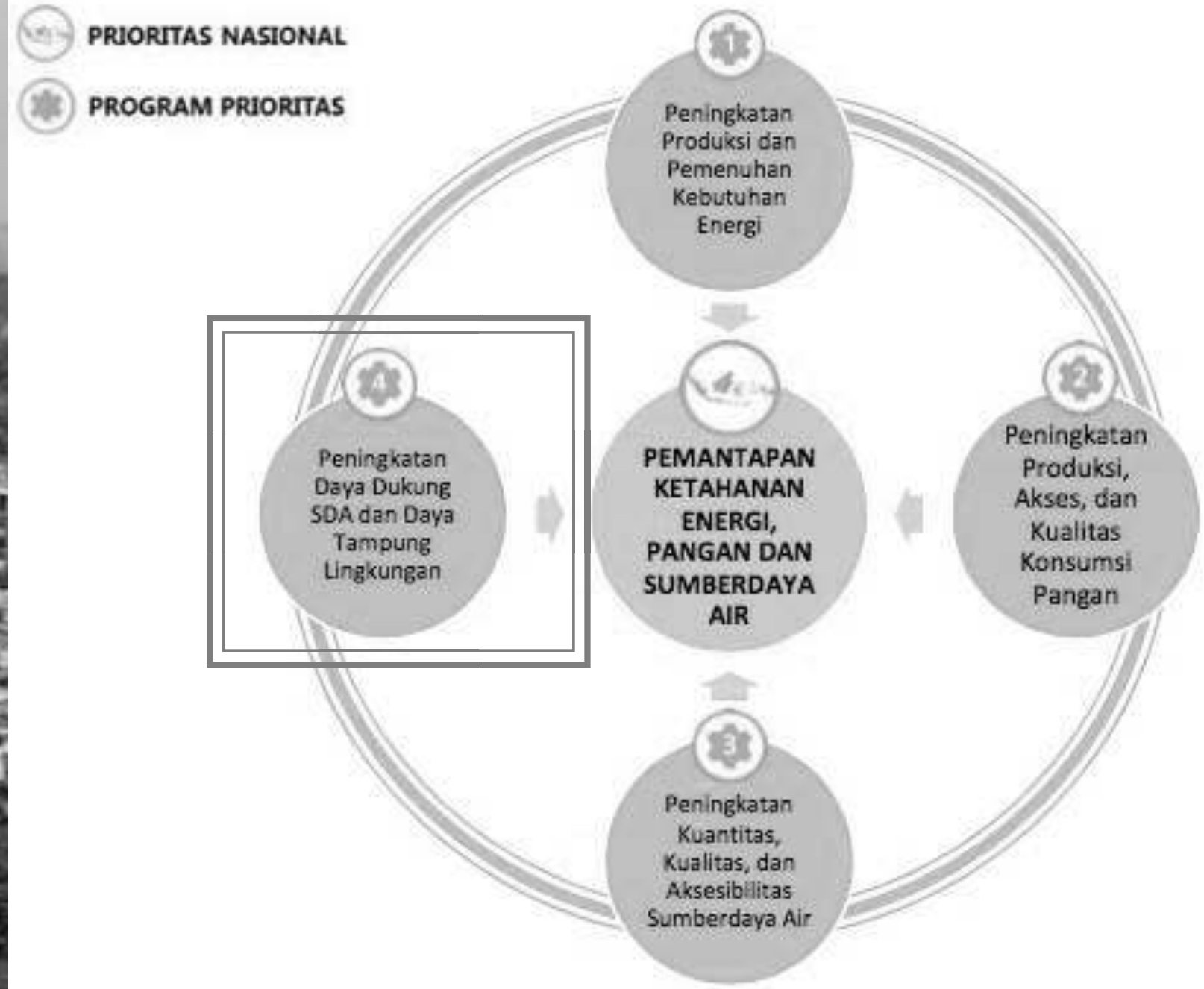
PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

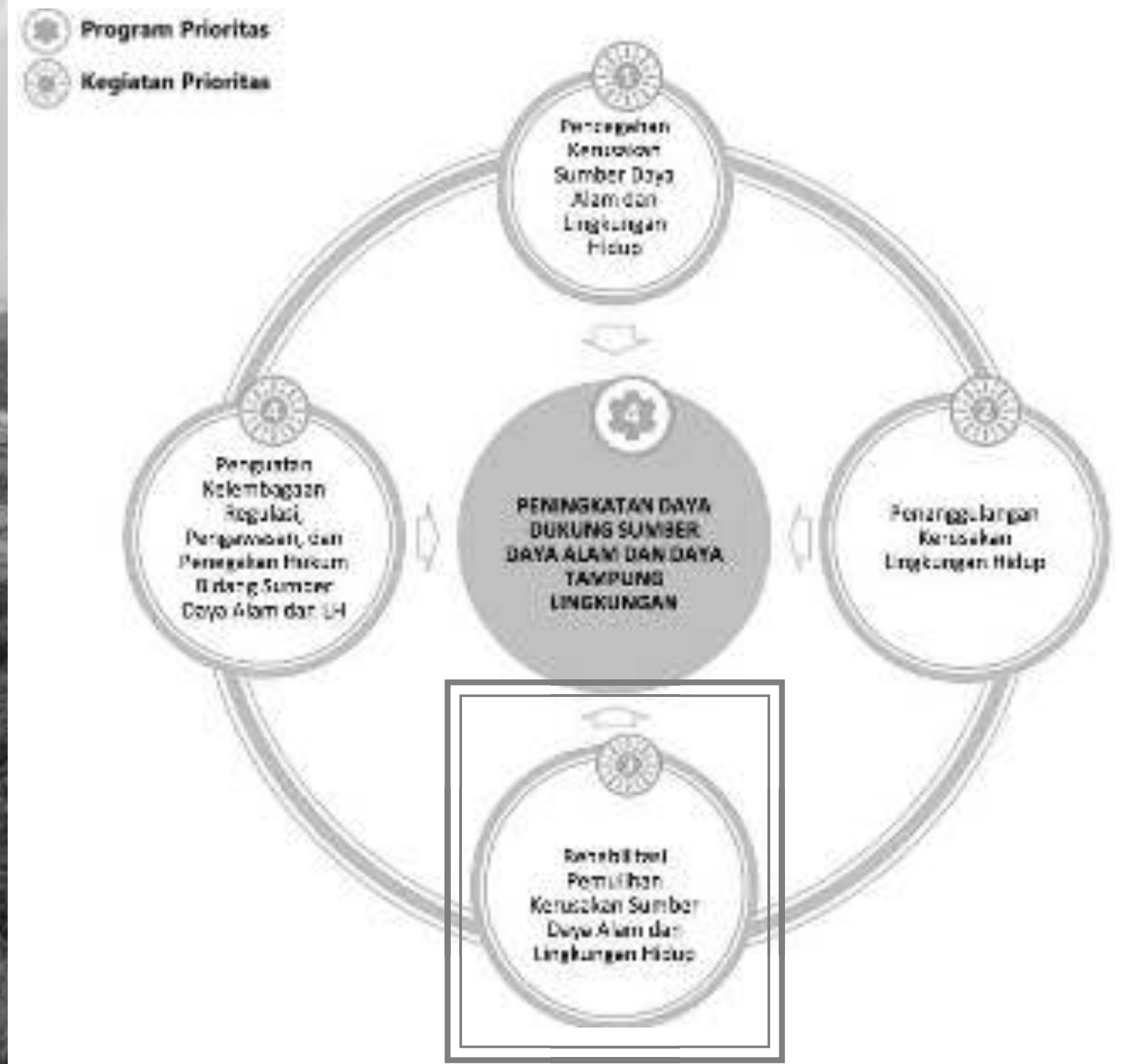


PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu



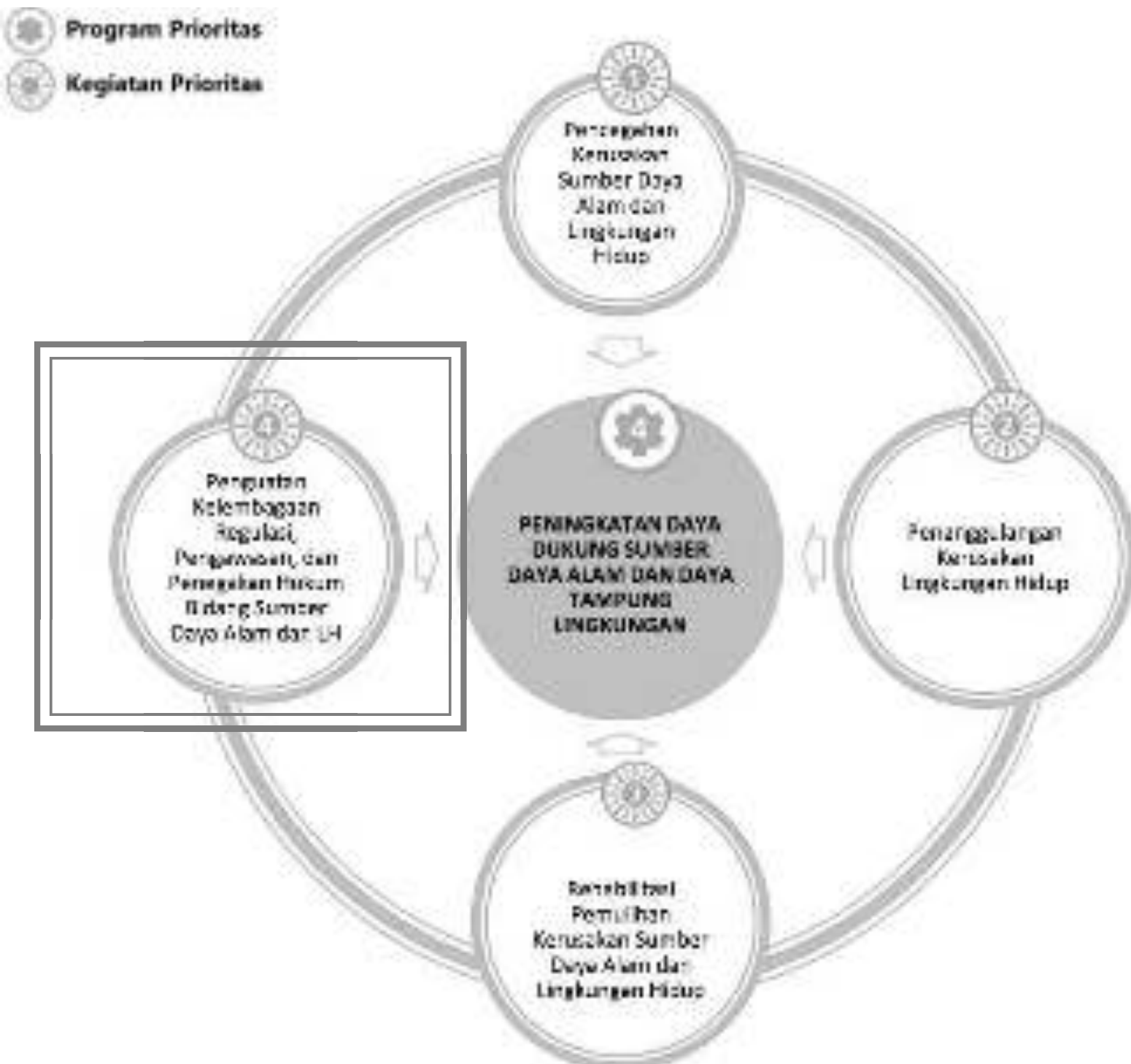
Program Prioritas 04 -
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan





Kegiatan Prioritas - 04

Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan LH





PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasional - 04

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Program Prioritas - 04

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Lingkungan

Kegiatan Prioritas -03

Rehabilitasi Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Proyek Prioritas Nasional - 003

Penanganan Pencemaran DAS Citarum

Proyek Prioritas Nasional - 002

Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas -04

Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Proyek Prioritas Nasional - 003

Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang menggunakan prinsip *money follows program*. Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2015-2019 telah diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019 dan Renstra Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis dan akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan prioritas nasional pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja-KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan Renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi e-planning KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Dokumen Renja-KLHK menjadi acuan bagi Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahunan yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.



L A T A R B E R L A K A N G

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENJABARAN RUMUSAN RENCANA KINERJA KLHK 2015-2019

TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK 2015-2019

Berdasarkan Dokumen Renstra KLHK 2015-2019

“
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional
”

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN

- 2015** Reorganisasi selesai, internalisasi dan adaptasi sistem, persiapan peningkatan akses kelola hutan kepada masyarakat, persiapan dan pelaksanaan reformasi agraria.
- 2016** Perbaiki 15 DAS dalam peningkatan IKLH dan ketahanan air, Intervensi 229 KPH, *Sanctuary* pada 20 taman nasional, penyiapan modal sosial.
- 2017** Peningkatan kualitas 15 DAS, penurunan degradasi dan peningkatan produksi hutan pada 229 KPH, peningkatan produksi TSL, peningkatan IKLH, terjadinya perbaikan hutan yang dikelola masyarakat dan menurunnya konflik tenurial.
- 2018** Ketahanan air oleh 15 DAS, sumbangan penyerapan tenaga kerja dan akselerasi pembangunan ekonomi nasional di 329 KPH dan 50 TN, hutan yang dikelola masyarakat mampu meyakinkan peningkatan kesejahteraan dan produksi hasil hutan.
- 2019** 15 DAS, 429 KPH, dan 50 TN serta peningkatan akses masyarakat telah dapat diartikulasikan sebagai dukungan Kementerian terhadap pembangunan nasional yang ditunjukkan dengan pencapaian 3 sasaran strategis di tingkat nasional.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TUJUAN

“Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.

SASARAN STRATEGIS

SS. 1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, air dan kesehatan masyarakat;

SS.2 Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

SS.3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU 1

Indeks Kualitas Hidup

IKU 2

Jumlah PNBPN dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup

IKU 3

Nilai Ekspor Hasil Hutan

IKU 4

Jumlah Kumulatif Kawasan Konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70

IKU 5

Jumlah Kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari

IKU 6

Luas Kumulatif kawasan hutan yang di kelola oleh masyarakat dan dikembalikan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa

IKU 7

Jumlah Provinsi yang mampu di lindungi bahaya kebakaran





INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TUJUAN

"Mengamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan"

SASARAN PROGRAM

SP. 1. Seluruh Pemegang Izin Lingkungan Menaati Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SP. 2 Meningkatnya Hak- Hak Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

SP.3 Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

- **IKP 1** - Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
- **IKP 2** - Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL
- **IKP 3** - Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan





INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun

Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun

Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL

Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL

Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL

Meningkatnya Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Meningkatnya Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan



KONDISI, ISU DAN TIPOLOGI

KONDISI UMUM

Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam

KONDISI KHUSUS

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM LHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakanantara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (Multidoors), dan penerapan kebijakan simbolik.

ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019

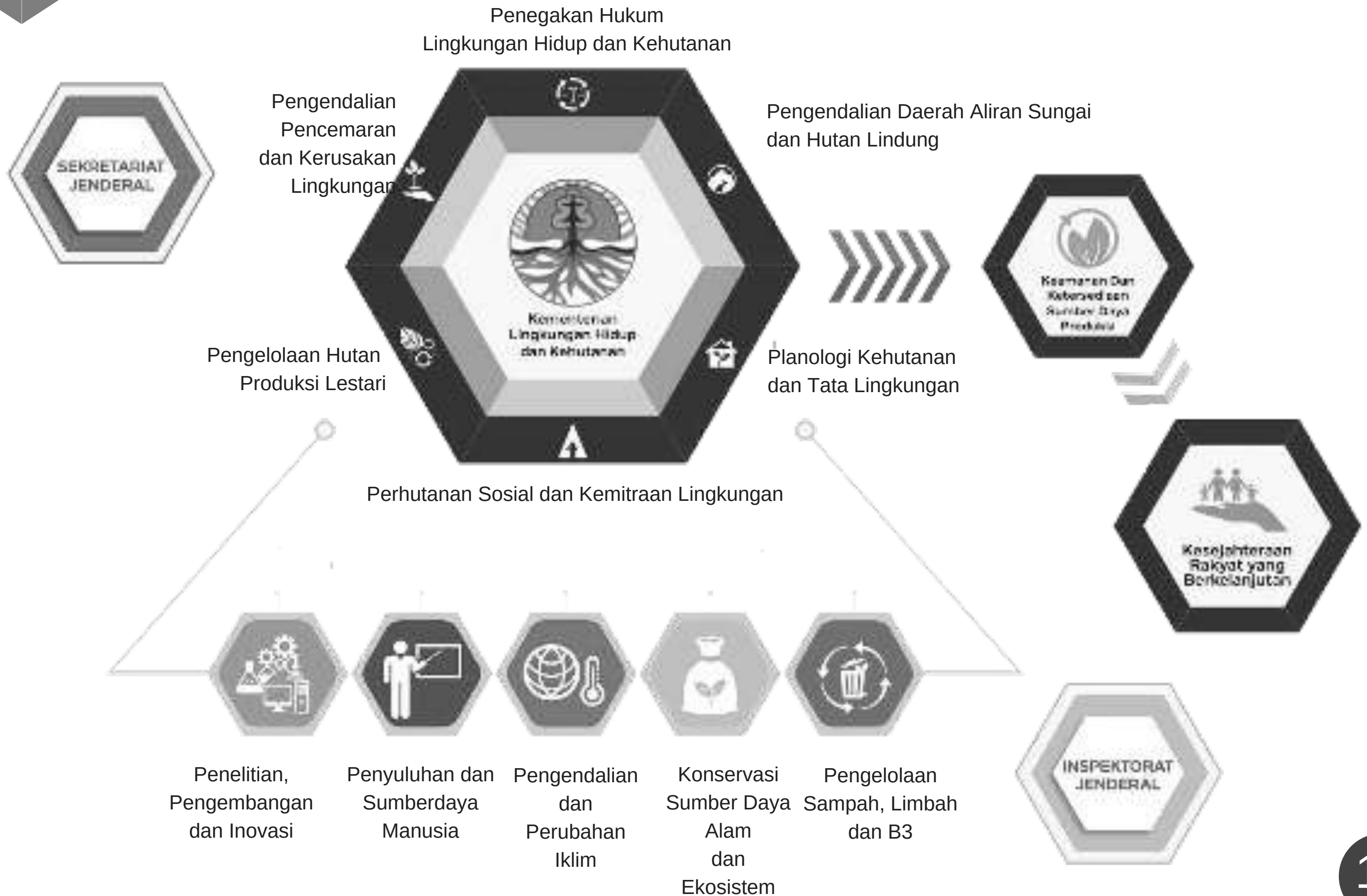
1. Penanganan Perubahan Iklim Serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim Kebencanaan
2. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati
3. Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologis
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
6. Pengelolaan Lingkungan Pesisir, Terumbu Karang, dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pengembangan Jasa Lingkungan

TIPOLOGI KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





TUJUAN STRATEGIS





PETA STRATEGI

Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup | Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Hutan & Lingkungan Hutan | Melestariakan Keseimbangan Ekosistem

Terwujudnya keamanan lingkungan dan hutan melalui peningkatan ketertatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan

Sasaran Strategis Program GAKKUM KLHK

Luas Hutan yang dapat dipertahankan dari Gangguan Keamanan Hutan Meningkat Setiap Tahun

Pemrosesan Pengaduan dan Pengawasan terhadap pirin LHK sebesar 100%

Penyelesaian pelanggaran admin & perdata sebesar 75% dari jumlah kasus & sengketa yang ditangani

Penyelesaian tindak pidana LHK (P21) sebesar 75% dari kasus pidana yang ditangani

Jejaring Kemitraan & Pemangku Kepentingan

Pengembangan & Penguatan Jejaring Kerja

Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Daerah

Pelayanan Masyarakat

Sumber Daya Finansial

Pendayagunaan Dana APBN

Pendayagunaan Dana Instansi Daerah

Pendayagunaan Sumber Daya Penunjang Lain

Proses Internal

Wenegasihan

Pengaduan

Pengawasan

Pengamanan Hutan

Penerapan Multi-Instrumen Hukum; Sanksi Admin, Pidana, Perdata

Penegakkan Hukum Multi Regim / Multi Daerah

Penerapan Kebijakan Simbolik

Sumber Daya & Kekuatan

Dukungan Staf

Penguatan PPLH, Polhut, PPNS

Penguatan Kebijakan, SOP, dsb

Penguatan Sarana & Prasarana

Dukungan Teknologi & Sistem Informasi

Inovasi & Science-Based



PETA STRATEGI GAKKUM KLHK

Prinsip Kerja
• Kecepatan,
• Ketepatan,
• Konsistensi,
• Kolaborasi

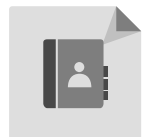


KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Permen LHK No. P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;



Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berfungsi sebagai pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;



PERUMUSAN KEBIJAKAN



PELAKSANAAN KEBIJAKAN



PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA



KOORDINASI DAN SINKRONISASI



PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI



PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN



PELAKSANAAN ADMINISTRASI



PELAKSANAAN FUNGSI LAINNYA



STRUKTUR ORGANISASI



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Ir. Kemal Amas, M.Sc
Sekretaris Direktorat Jenderal



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif



Ir. Susty Iriyono, M.Si
Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan



Jasmin Ragil, SH, MH
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Yazid Nurhuda, SH, MA
Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Edward Sembiring, S.Hut, M.Si
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera



Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Subhan, S.Hut, M.Si
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan



Ir. Muhammad Nur, MSP
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi



A.G Martana, S.Hut, M.H
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua



PENGARUSUTAMAAN GENDER

Di tahun anggaran 2019, Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen GAKKUM KLHK akan mengidentifikasi Kegiatan Kegiatan yang Responsive Gender, terutama kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana baik untuk PPLH, PPNS maupun POLHUT (SPORC) di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini tentu memperhatikan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat didalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sehingga Anggaran Responsif Gender terlaksana dengan efektif dan efisien.

Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

- Penyediaan Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

6 Lokasi

Rp.18.000.000.000,-

Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- Penyediaan Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1 Lokasi

Rp. 72.000.000,-

Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

6 Lokasi

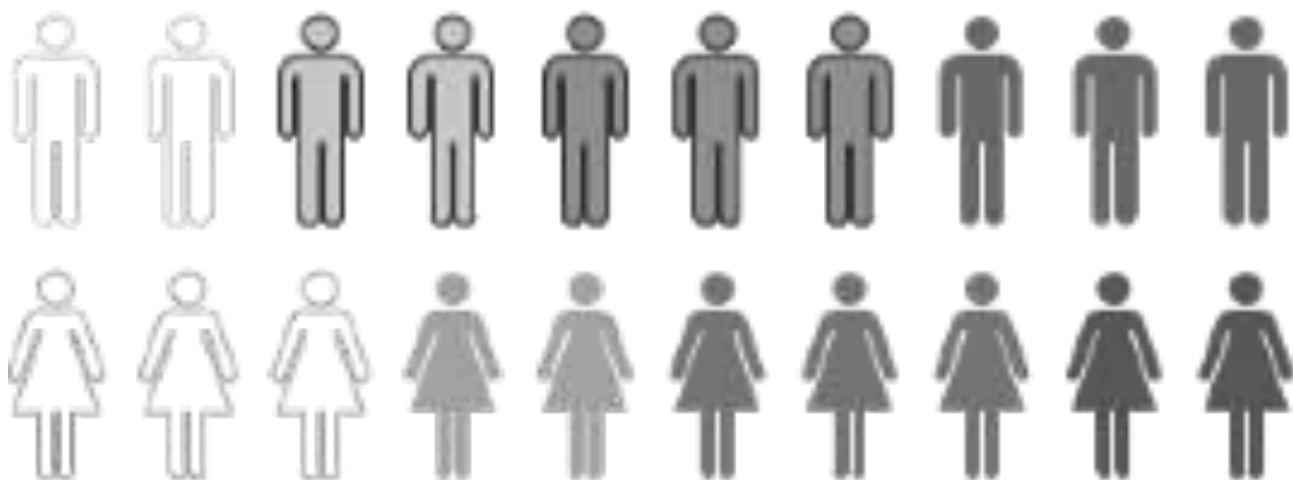
Rp.67.200.000.000,-

Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6 Lokasi

Rp. 15.000.000.000,-



Anggaran Responsive Gender (ARG)

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 100.272.000.000,-



PELUANG DAN TANTANGAN

Guna menjaga keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan hidup perlu dibangun sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan hukum, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK).

PELUANG

Upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara Republik Indonesia dan tujuh undang-undang tentang konservasi, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan pencucian uang. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini juga terlaksana dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari pemimpin negara yang tercermin dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dukungan masyarakat, kolaborasi dan kordinasi institusi penegakan hukum, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi semakin menunjang terciptanya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dukungan Masyarakat
Kolaborasi dan Kordinasi Institusi Penegakan Hukum
Keterbukaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi



KONSTITUSI HIJAU

Pasal 28 H Ayat 1
Pasal 33 Ayat 4



KOMITMEN POLITIK NASIONAL

"Tindak Tegas para pelaku ilegal logging, illegal mining, dan illegal fishing"

(Presiden Joko Widodo, Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2016)



NAWACITA

Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kepasiahan Hukum, Penegakan Hukum yang Berkualitas



PERATURAN OPERASIONAL

UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang





PELUANG DAN TANTANGAN

TANTANGAN

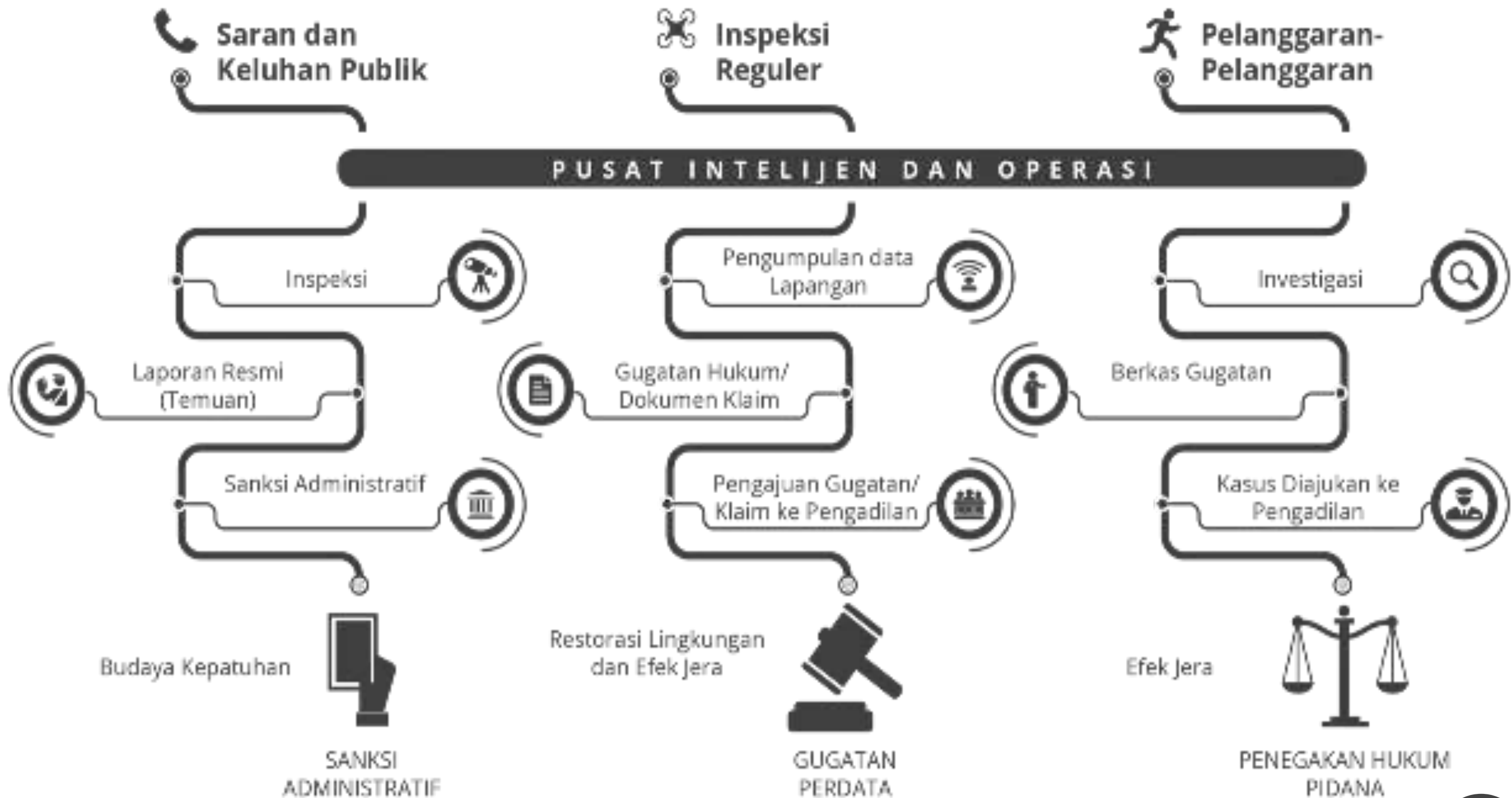
Ditjen Gakkum KLHK berurusan dengan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary Crime) karena tipologi kejahatan yang bervariasi, modus operandi yang kompleks serta dilakukan oleh multi aktor. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang besar yaitu menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir, kekeringan, kebakaran hutan), mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula,

" Fight Against Xtraordinary Crime. "





MULTI INSTRUMEN GAKKUM





PENGUATAN KAPASITAS

BIG DATA



SURVEILLANCE



FORENSIK



JEJARING AHLI





KERJA KERJA GAKKUM LHK





B A B I I
C A P A I A N K I N E R J A
D A N P R O G N O S I S



HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT HUKUM 3 TAHUN PENAMBANG ILLEGAL

“Kami akan mengembangkan kasus ini untuk menindak pelaku-pelaku terkait lainnya. Pada saat ini, Penyidik KLHK dan beberapa penyidik lainnya sedang mengembangkan pendekatan multidoor yaitu penyidikan berlapis untuk meningkatkan efek jera, termasuk menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU)”. Kami mengapresiasi putusan majelis hakim dan ini merupakan titik masuk untuk pengembangan kasus selanjutnya. Kami bekerjasama dengan banyak pihak termasuk PPATK untuk mendapatkan informasi aliran keuangan dari pelaku terkait pertambangan ilegal ini. - Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen GAKKUM KLHK.





CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA PROGRAM 2015-2019

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Program		2015	2016	2017	2018	2019
a. Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Target	500 Izin	300 Izin	500 Izin	600 Izin	650 Izin
	Capaian	238 Izin	597 Izin	1.094 Izin	650 Izin	600 Izin
b. Jumlah Penyelesaian kasus sampai P-21 untuk Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi	Target	88 Kasus P-21	142 Kasus P-21	75 Kasus P-21	75 Kasus P-21	120 Kasus P-21
	Capaian	118 Kasus P-21	150 Kasus P-21	134 Kasus P-21	100 Kasus P-21	100 Kasus P-21
c. Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Target	3.000.000 Ha	2.389.000* Ha	4.000.000 Ha	5.000.000 Ha	2.675.000 Ha
	Capaian	3.072.198 Ha	986.529 Ha	3.005.360 Ha	3.500.000 Ha	2.600.000 Ha

* Prognosis Kinerja Program



PROGNOSIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018

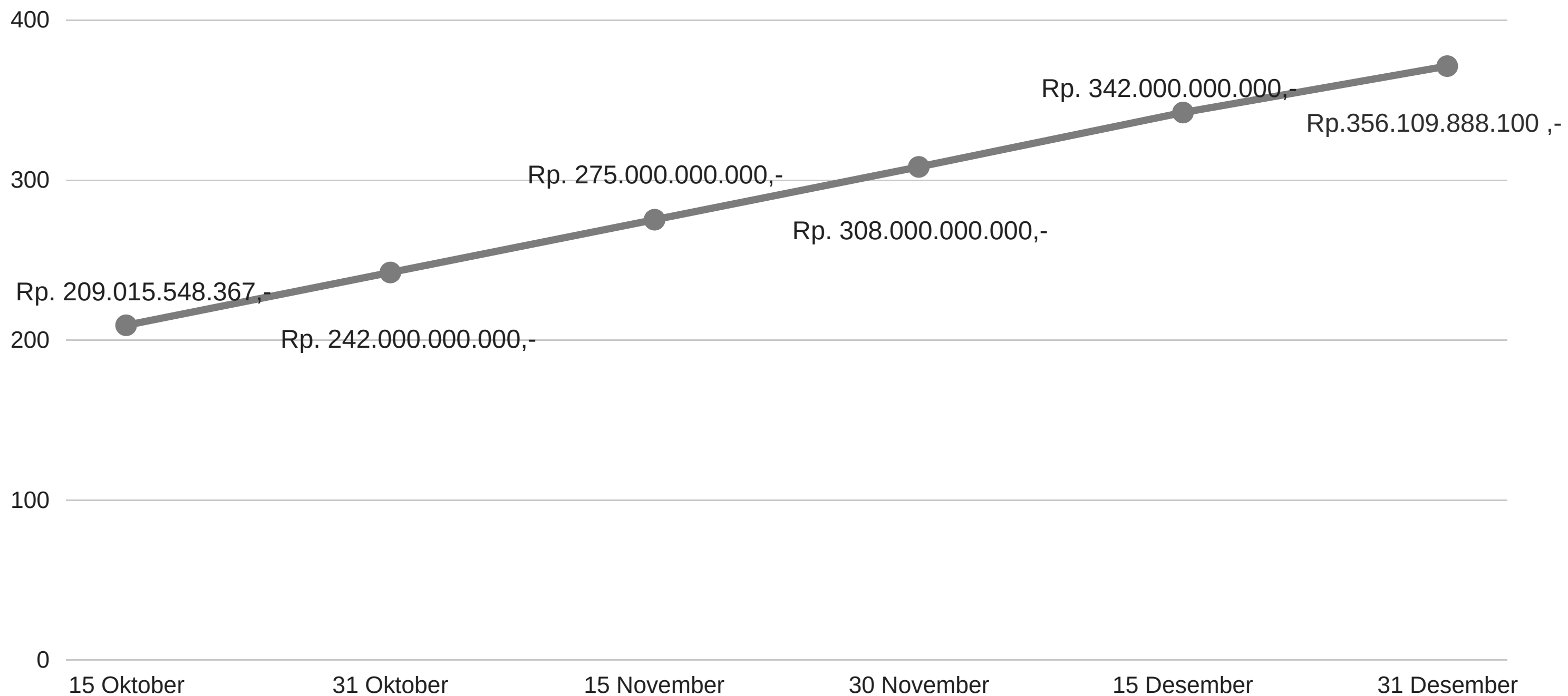
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pagu 2018 = Rp.372.694.807.012 ,-



95.55%



* Prognosis Kinerja Anggaran



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

I. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

- **Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti**

Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam yang disampaikan oleh masyarakat tertangani sehingga pencemaran dan/atau kerusakan yang ditimbulkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diatasi. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi Administrasi dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di 5 (lima) wilayah regional.



	2015	2016	2017	2018	2019
Target	500 Pengaduan	500 Pengaduan	500 Pengaduan	1000 Pengaduan	1.250 Pengaduan
Capaian	562 Pengaduan	684 Pengaduan	529 Pengaduan	900 Pengaduan	1.200 Pengaduan

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

Pengaduan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

I. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

• Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Tujuan dilakukannya pengawasan izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah:

- a. meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- b. Pengawasan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang akurat dan menyeluruh untuk penegakan hukum dan dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.



Izin

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	500 Izin	300 Izin	500 Izin	600 Izin	650 Izin
Capaian	238 Izin	597 Izin	1.094 Izin	575 Izin	600 Izin

*Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

I. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi



• Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif

Penegakan hukum administratif pemanfaatan sumberdaya alam diharapkan secara langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal dekat kegiatan usaha dan/atau kegiatan, maupun masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat-pusat industri untuk mendukung terwujudnya kondisi kualitas lingkungan yang baik.

Masyarakat yang tinggal dekat pusat-pusat industri maupun kegiatan usaha, cenderung akan menerima perbaikan kualitas lingkungan setelah kegiatan usaha melaksanakan kewajiban/perintah sanksi administratif dan menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Penegakan hukum administratif ini akan bermanfaat bagi usaha dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah.

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	45 Sanksi	70 Sanksi	70 Sanksi	140 Sanksi	100 Sanksi
Capaian	48 Sanksi	220 Sanksi	126 Sanksi	130 Sanksi	95 Sanksi

Sanksi

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

II. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



- Pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan

Kegiatan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum melalui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan yang efektif dan berkualitas. Adapun ruang lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, yaitu : KLHK, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Instansi Terkait (Pusat dan Daerah), Aparat Penegak Hukum, Instansi Lingkungan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ahli, Lawyer, Dunia Usaha, LSM, dan Masyarakat.

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan
Capaian	5 Gugatan	10 Gugatan	9 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan

Gugatan

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

II. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- Kasus Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

Kegiatan Untuk mencapai kepastian hukum melalui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan serta memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup .

Adapun ruang lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu KLHK, Instansi Lingkungan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ahli, Dunia Usaha, LSM, dan Masyarakat.



	2015	2016	2017	2018	2019
Target	14 Kesepakatan	15 Kesepakatan	18 Kesepakatan	20 Kesepakatan	25 Kesepakatan
Capaian	25 Kesepakatan	40 Kesepakatan	39 Kesepakatan	23 Kesepakatan	24 Kesepakatan

Perkara

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

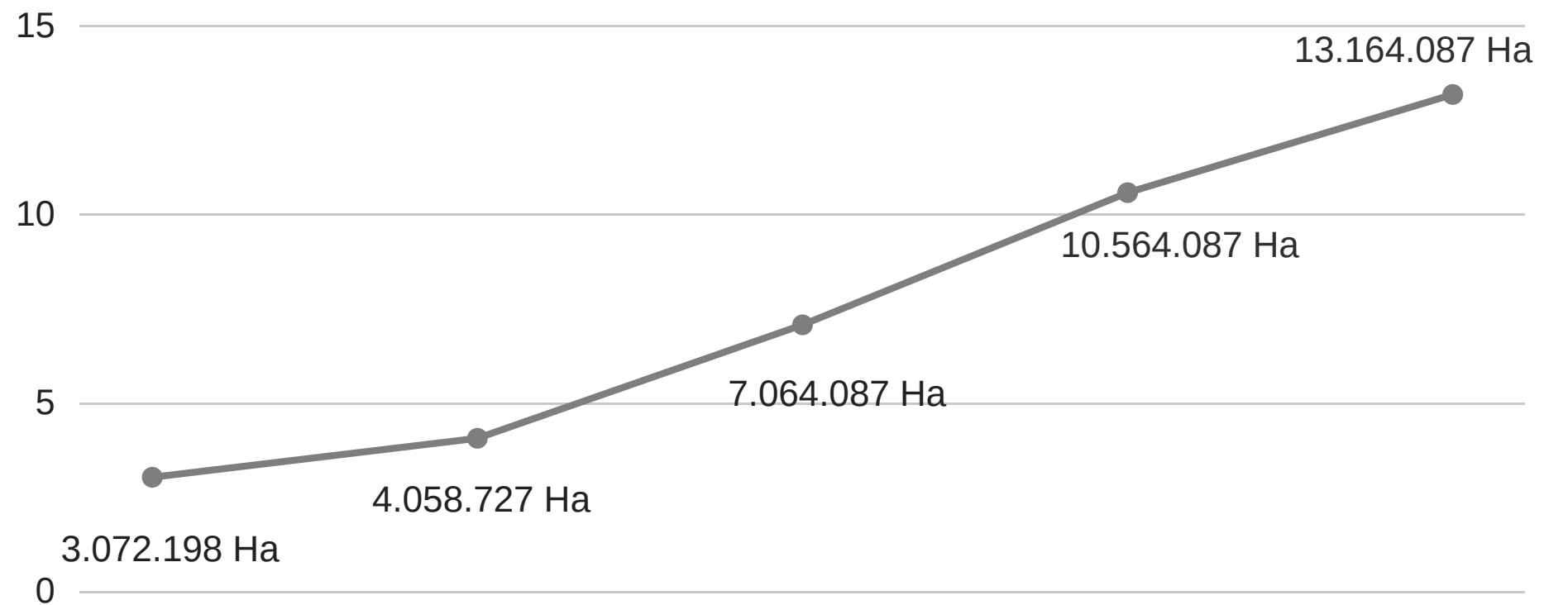


A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

III. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang Kehutanan

Tujuan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan adalah mewujudkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan melalui pencegahan ancaman dan penanggulangan gangguan.



	2015	2016	2017	2018	2019
Target	3.000.000 Ha	2.389.000* Ha	4.000.000 Ha	5.000.000 Ha	2.675.000 Ha
Capaian	3.072.198 Ha	986.529 Ha	3.005.360 Ha	3.500.000 Ha	2.600.000 Ha

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

Hektar



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IV. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Kasus Pidana LHK yang diselesaikan (P-21)

Tujuan dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan adalah:

- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk para pelaku usaha;
- Menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat;
- Menjamin terjaganya sumber daya alam bagi keberlangsungan pembangunan dan,
- Memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.



	2015	2016	2017	2018	2019
Target	88 P-21	142 P-21	75 P-21	100 P-21	125 P-21
Capaian	118 P-21	150 P-21	134 P-21	100 P-21	120 P-21

P-21

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

V. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya



- SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi dari swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ke tiga dengan penyiapan beberapa metode pelaksanaan yang meliputi:

- Pertemuan teknis dalam rangka koordinasi dan mengumpulkan data dan bahan masukan;
- Pembekalan yang menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten;
- Pengembangan fasilitas, dan pengadaan peralatan pendukung proses;
- Kunjungan kerja dalam rangka menghadiri rapat/konvensi
- Kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan, dan studi banding;
- Penyusunan bahan telaahan dan kajian;
- Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri (KLN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

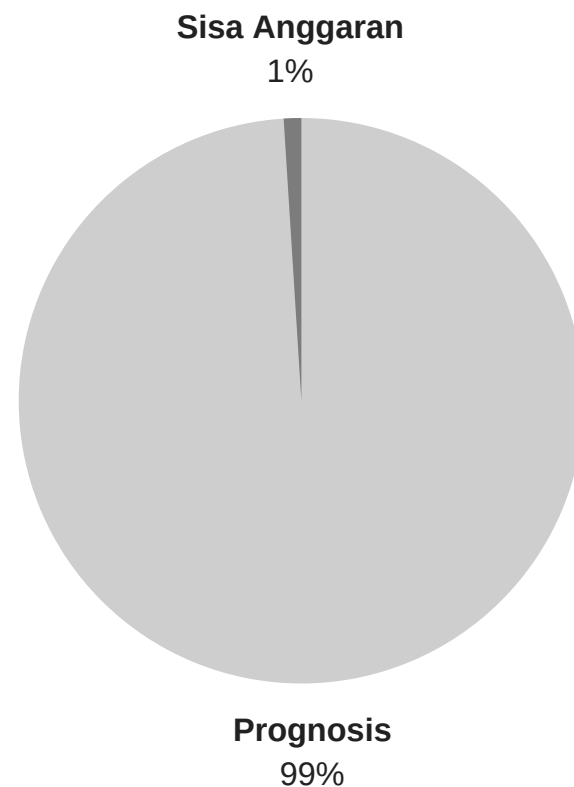
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	70 Poin	72 Poin	75 Poin	76 Poin	78 Poin
Capaian	68 Poin	76 Poin	70,43 Poin	76 Poin	78 Poin

* Prognosis Kinerja Program

Poin



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp. 65.070.748.000,-

Prognosis Rp. 64.745.394.260

Target 5.000.000 Hektar

Prognosis 3.500.000 Hektar

99.60%

70.00%

Prioritas Nasional 2018

Program Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Proyek K/L

Output

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Kepastian Hukum

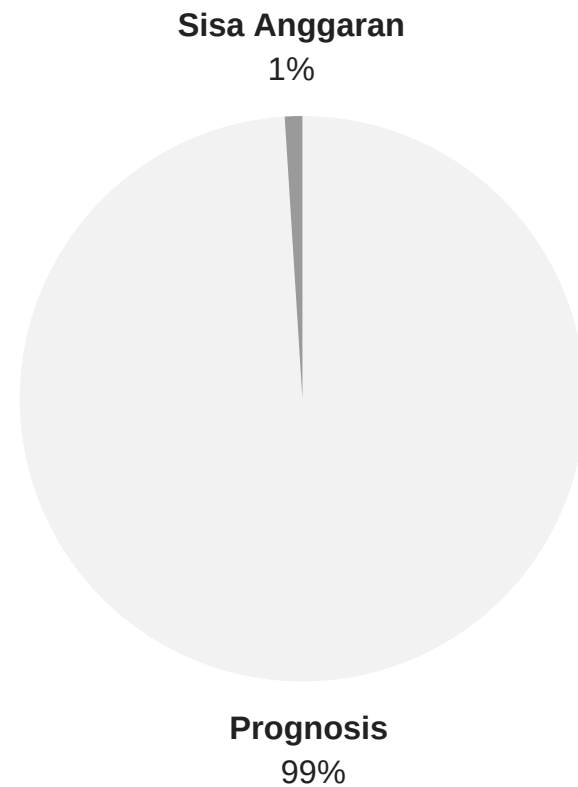
Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan;



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp. 65.194.830.000,-

99.60%

Prognosis Rp. 64.934.050.680

Target 75 P-21

133.33%

Prognosis 100 P-21

Prioritas Nasional 2018

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Program Prioritas

Kepastian Hukum

Proyek Prioritas Nasional

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Proyek K/L

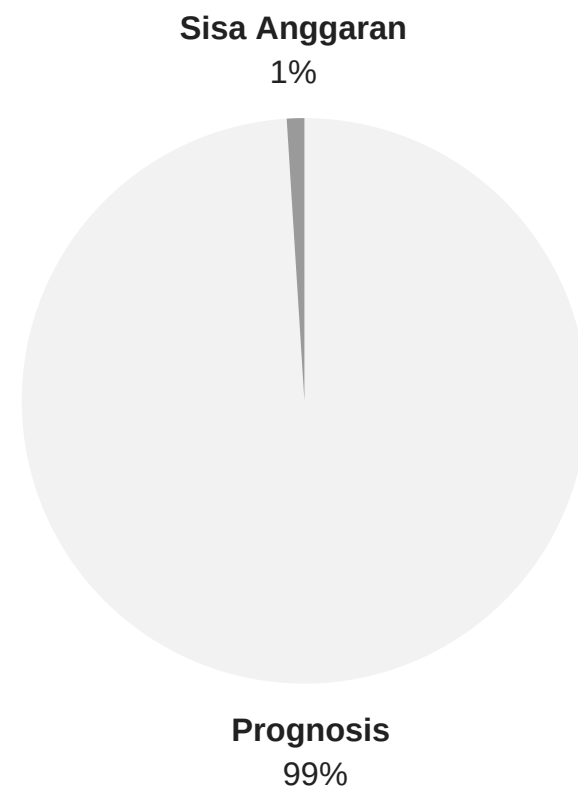
Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA

Output

Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P-21);



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp 13.522.600.000,-

Prognosis Rp. 13.468.509.600,-

Target 1.000 Pengaduan

Prognosis 900 Pengaduan

99.60%

90.00%

Prioritas Nasional 2018

Program Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Proyek K/L

Output

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Kepastian Hukum

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pemanfaatan SDA

Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp 13.750.000.000,-

99.60%

Prognosis Rp. 13.695.000.000,-

Target 600 Izin

108,33%

Realisasi 650 Izin

Prioritas Nasional 2018

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Program Prioritas

Kepastian Hukum

Proyek Prioritas Nasional

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Proyek K/L

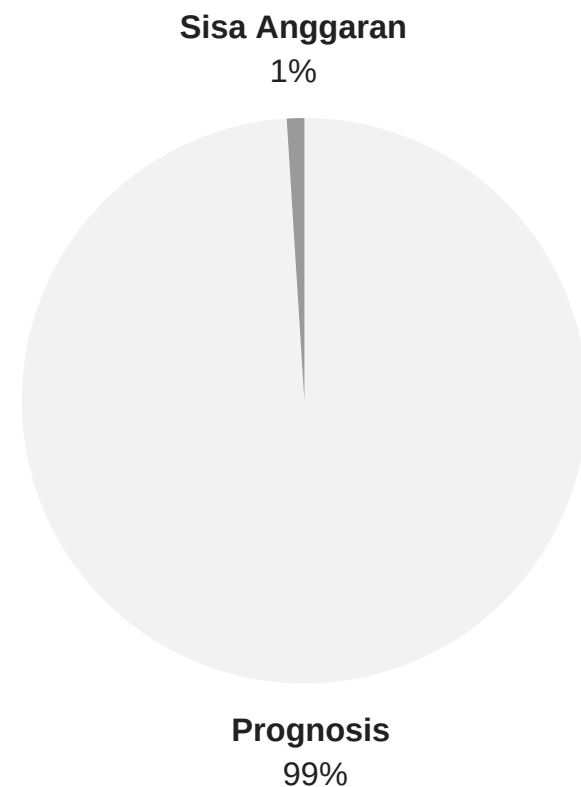
Pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA

Output

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH;



B. PROGNOISIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp 13.750.000.000,-

99.60%

Prognosis Rp. 13.695.000.000,-

Target 140 Sanksi

92,86%

Realisasi 130 Sanksi

Prioritas Nasional 2018

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Program Prioritas

Kepastian Hukum

Proyek Prioritas Nasional

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Proyek K/L

Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Output

Penerapan Sanksi Administrasi



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp 9.599.000.000,-

99.60%

Prognosis Rp. 9.560.604.000,-

Target 10 Gugatan

90,00%

Realisasi 9 Gugatan

Prioritas Nasional 2018

Program Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Proyek K/L

Output

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Kepastian Hukum

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Penegakan Hukum Perdata Pemanfaatan SDA

Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018



Anggaran Rp 8.600.000.000,-



99.60%



Prognosis Rp. 8.565.600.000,-



Target 75% dari Total Perkara



50,00%



Prognosis 50% dari Total Perkara

Prioritas Nasional 2018

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Program Prioritas

Kepastian Hukum

Proyek Prioritas Nasional

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Proyek K/L

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan SDA

Output

Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan



B. PROGNOSIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Anggaran Rp 52.796.822.000,-

Prognosis Rp. 51.001.730.052,-

96.60%

1. Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum;

Target 1800 Orang

Prognosis 1750 Orang

97,22 %

2. Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum

Target 300 Orang

Prognosis 290 Orang

96,67%

3. Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS;

Target 400 Orang

Prognosis 390 Orang

97,50 %

* Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

Prioritas Nasional 2018

Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Program Prioritas

Kepastian Hukum

Proyek Prioritas Nasional

Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam

Proyek K/L

Penyediaan Sarana dan Prasarana Apgakum Bidang SDA



B A B I I I
R E N C A N A K E R J A
2 0 1 9





Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas - 4 :

Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Proyek Prioritas Nasional - 002 :

Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

a. Pengaduan yang masuk tertangani

1.200 Pengaduan

b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan

650 Izin

c. Penerapan Sanksi administrasi

100 Sanksi

3. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

2.669.000 Hektar

Proyek Prioritas Nasional - 003

Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

a. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

7 Gugatan

b. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

20 Kesepakatan

4. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)

122 P-21





Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas - 3 :

Rehabilitasi Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003

Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

d. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum

100 Perusahaan

2. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

c. Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum

3 Gugatan

3. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

b. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

6.000 Hektar

4. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

b. Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum

3 P-21





NON PRIORITAS NASIONAL

5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaak Teknis Unit Lainnya

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1 Layanan

1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

- Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

6 Lokasi

3. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

6 Lokasi

4. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6 Lokasi





B A B I V
P E N U T U P



P E N U T U P

Dengan laporan ini diharapkan tercapai optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun tahun kedepan.



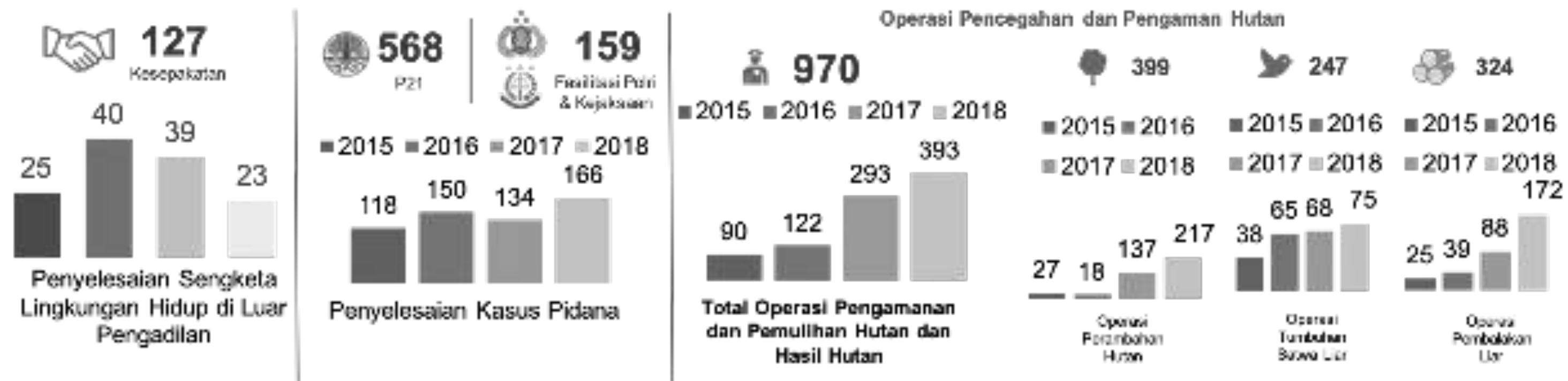
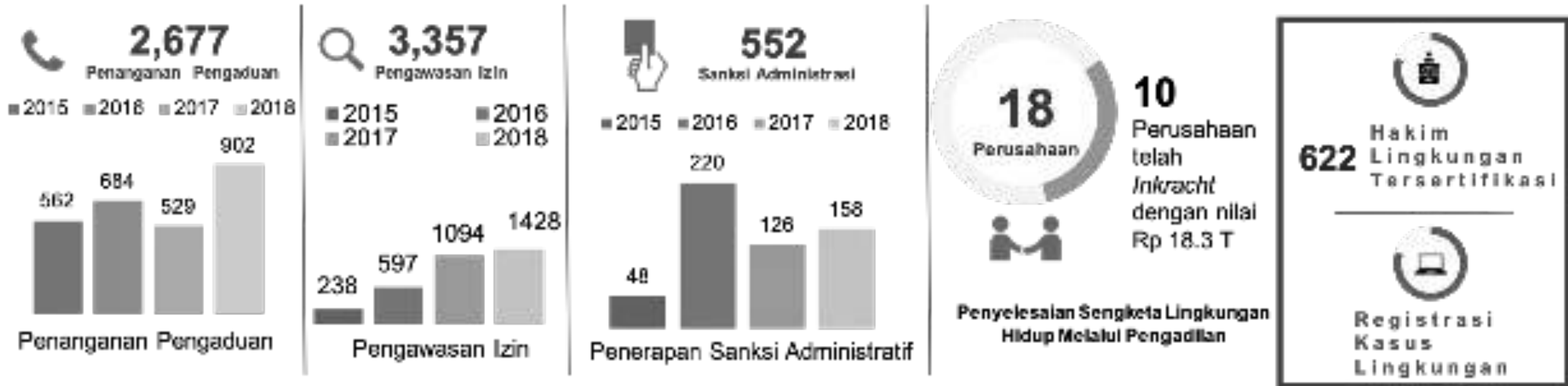


L A M P I R A N



INTEGRITAS
PROFESIONAL
PEDULI
RESPONSIF





Catatan : Data di rangkum hingga Desember 2018



ILLEGAL LOGGING

324 Operasi
19.626,17 m³
269 P-21
6 Kasus Fasilitasi Polri/Jaksa



PENCEMARAN LINGKUNGAN

2.434 Pengawasan Izin dari **672** Perusahaan
299 Sanksi Administratif
1 Gugatan Melalui Pengadilan
13 Pidana (P-21)
64 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan



TUMBUHAN SATWA LIAR DILINDUNGI

247 Operasi
226.095 ekor
10.899 bag. tubuh satwa
190 P-21



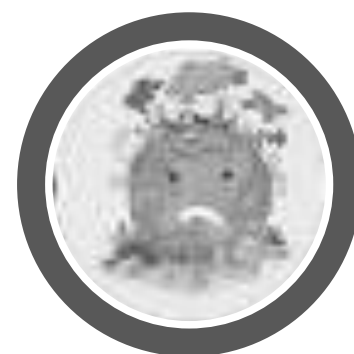
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

414 Pengawasan Izin dari **138** Perusahaan
174 Sanksi Administrasi
13 Gugatan
72 Fasilitasi Kejaksaan (Pidana)
3 Pidana (P-21)



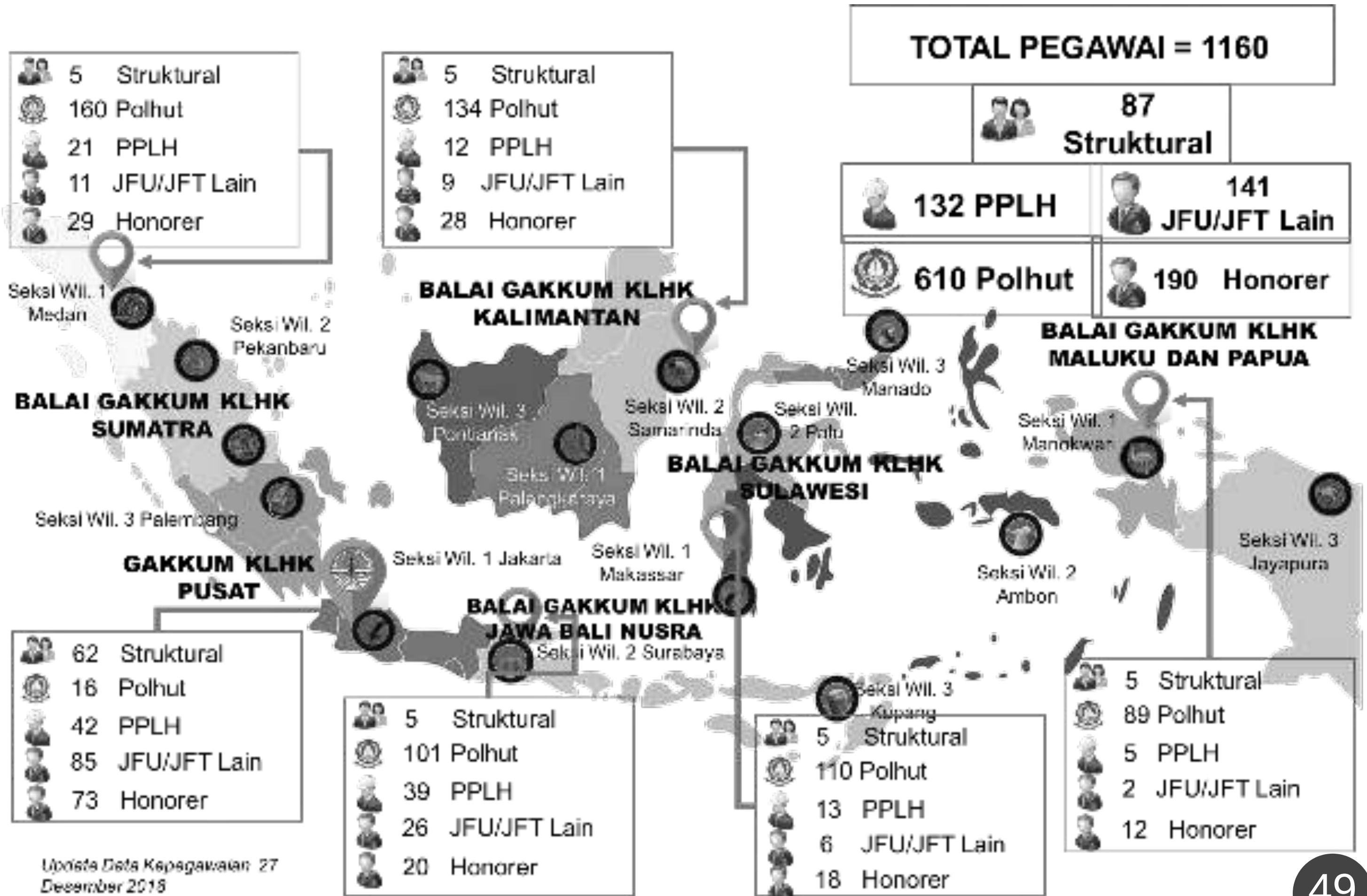
PERAMBAHAN HUTAN

399 Operasi
12.626.012 Ha
91 P-21
11 Kasus Fasilitasi Polri/Jaksa

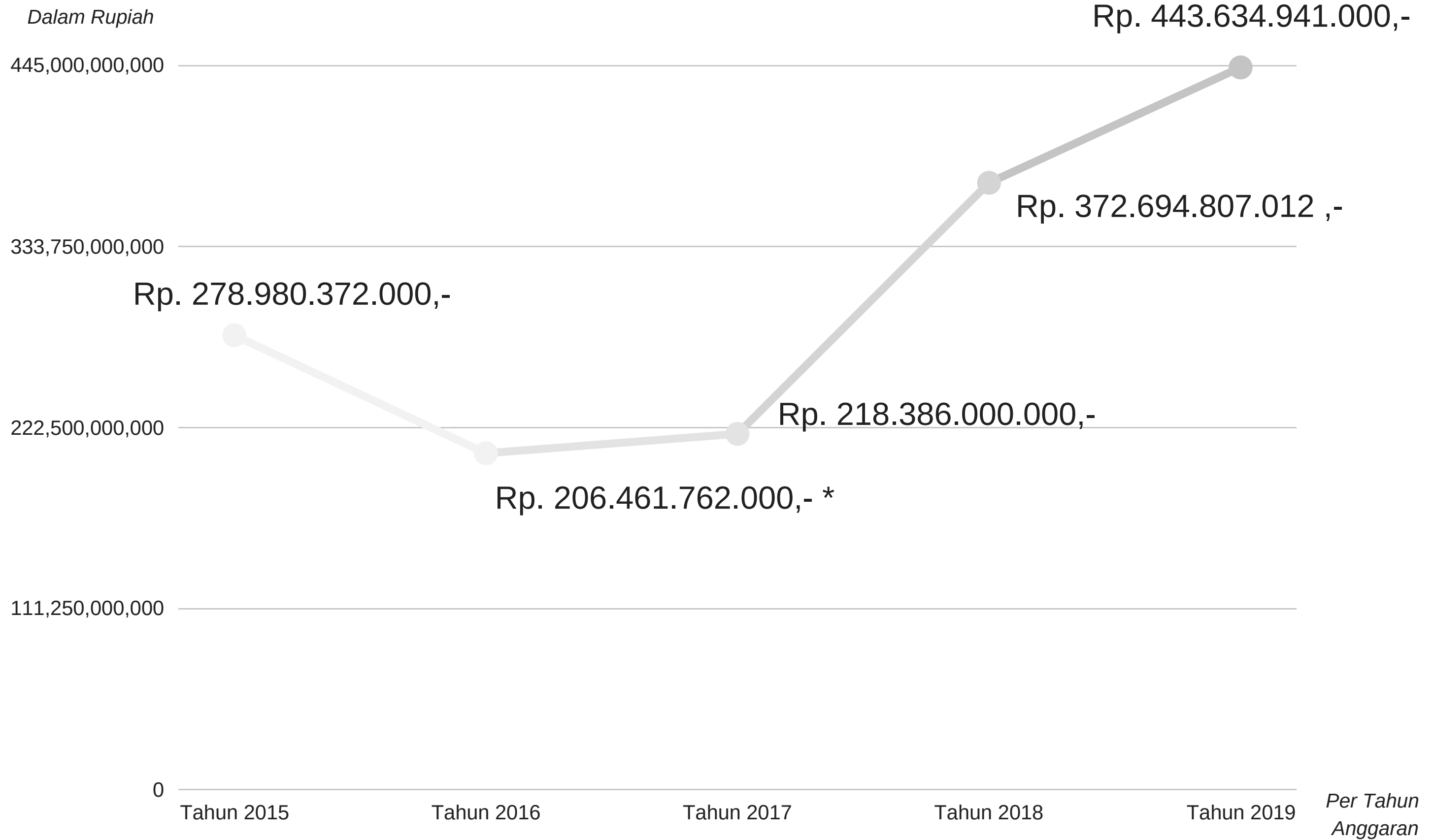


KERUSAKAN LINGKUNGAN

637 Pengawasan Izin dari **113** Perusahaan
38 Sanksi Administratif,
3 Gugatan
33 Pidana (P-21)
6 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan

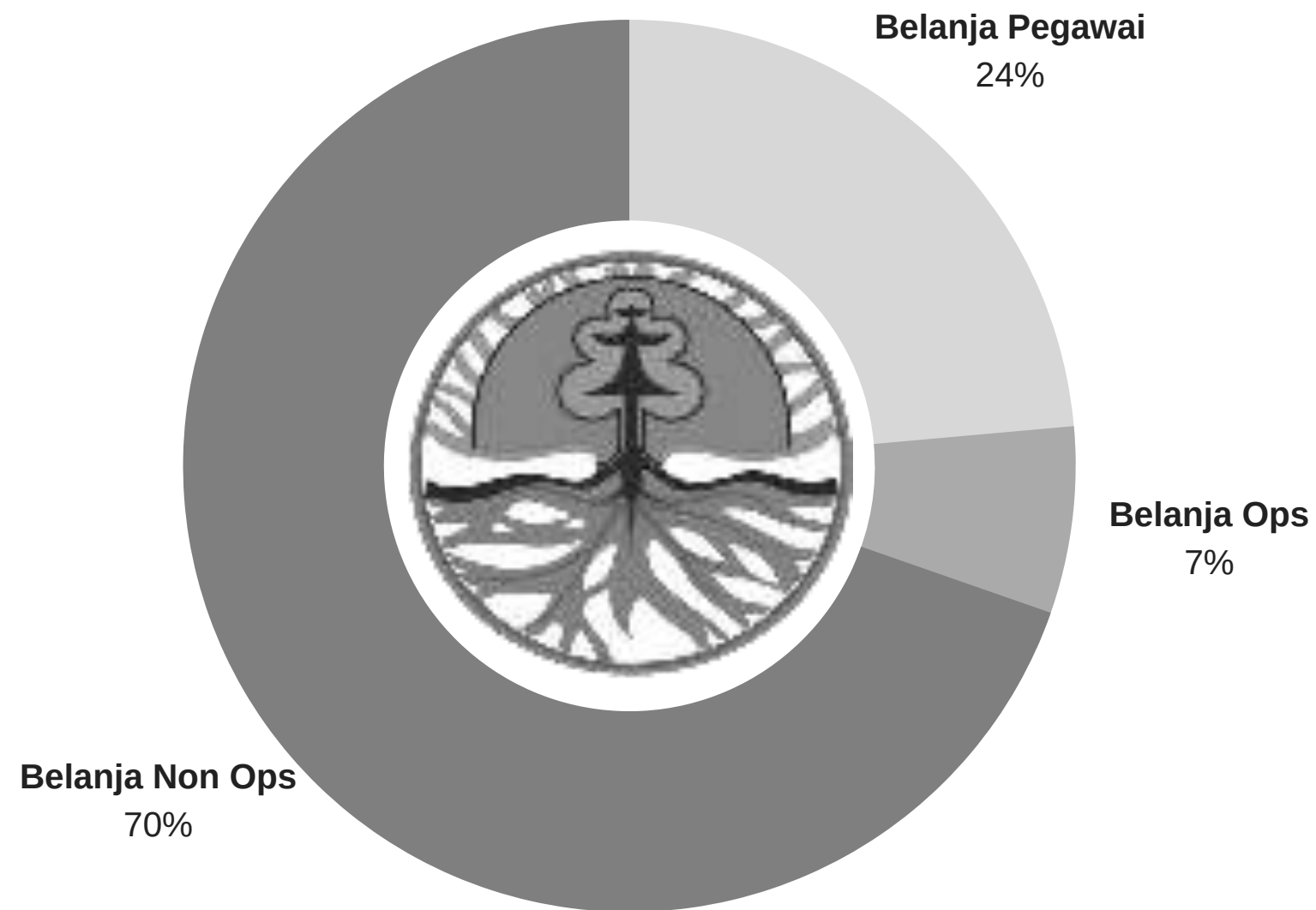


Tabel. 1 - Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2015 s .d 2019



*Selfblocking TA 2016, Rp. 40,536,156,000

Tabel. 2 - Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun Anggaran 2019 (Per Oktober 2018)



Sumber Dana

Belanja Non Operasional

Belanja Operasioanal

Belanja Pegawai

Jumlah

RM

Rp.214.033.009.000

Rp. 29.997.693.000

Rp. 104.604.239.000

Rp. 348.634.941.000,-

PNBP

Rp. 95.000.000.000

-

-

Rp. 95.000.000.000,-

Jumlah

Rp.309.033.009.000

Rp. 29.997.693.000

Rp. 104.604.239.000

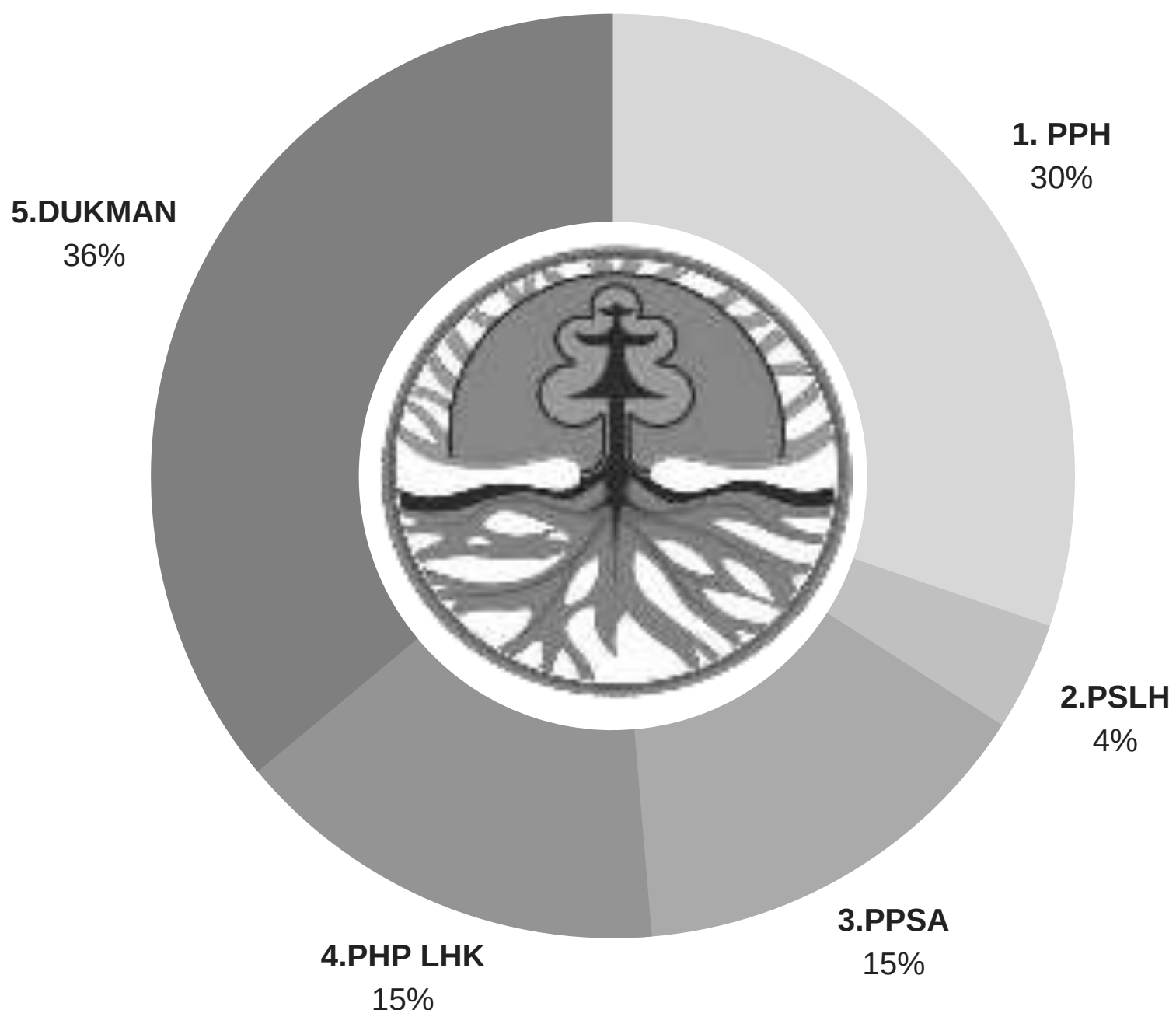
Rp. 443.634.941.000,-

Tabel. 3 - Kerangka Pendanaan Per Kegiatan Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun 2019 (Oktober 2018)

Anggaran Program

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 443.634.941.000,-



Anggaran Per Kegiatan

1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Rp. 134.235.727.000,-

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Rp. 16.847.223.000,-

3. Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Rp. 64.768.840.000,-

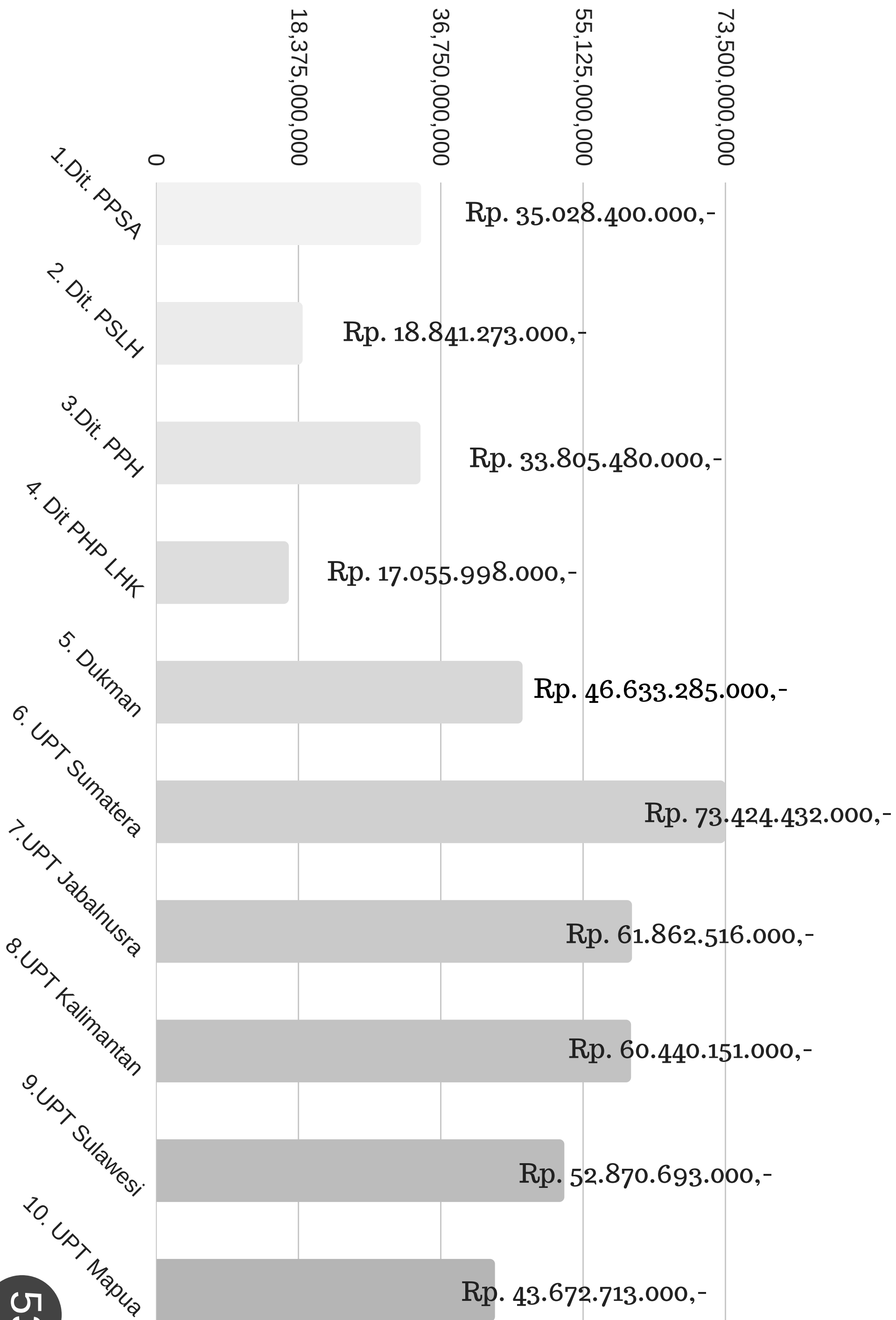
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 67.881.219.000,-

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya

Rp. 159.901.932.000,-

Tabel. 4 - Kerangka Pendanaan Per Satuan Kerja Direktorat Jenderal GAKKUM LHK Tahun 2019 (Per Oktober 2018)



Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas - 4 : Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 002

Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rp. 105.723.407.000,-

Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------------|
| • Pengaduan yang masuk tertangani | 1.200 | Pengaduan | Rp. 19.556.520.000,- |
| • Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan | 650 | Izin | Rp. 18.712.320.000,- |
| • Penerapan Sanksi administrasi | 100 | Sanksi | Rp. 5.500.000.000,- |

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- | | | | |
|--|------------------|--------|-----------------------------|
| • Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi | 2.669.000 | Hektar | Rp. 61.954.567.000,- |
|--|------------------|--------|-----------------------------|

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003

Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rp. 65.254.442.000,-

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------------------|
| • Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan | 7 | Gugatan | Rp. 7.916.667.000,- |
| • Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan | 20 | Kesepakatan | Rp. 5.858.556.000,- |

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- | | | | |
|--|------------|------|-----------------------------|
| • Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) | 122 | P-21 | Rp. 51.481.219.000,- |
|--|------------|------|-----------------------------|

Tabel. 6 - Anggaran Prioritas Nasional, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas - 4 : Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL - 003

Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Rp. 12.481.160.000,-

Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

- Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum

100 Perusahaan

Rp. 3.000.000.000,-

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum

3 Gugatan

Rp. 3.000.000.000,-

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

6.000 Hektar

Rp. 5.081.160.000,-

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum

3 P-21

Rp. 1.400.000.000,-



Tabel. 7 - Target dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
a. Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	60 %	70 %	60 %	65 %	650 Izin
b. Jumlah Penyelesaian kasus sampai P-21 untuk Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi	-	-	40 Kasus	40 Kasus	125 Kasus
c. Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	3.000.000 Hektar	2.389.000* Hektar	4.000.000 Hektar	5.000.000 Hektar	2.675.000 Hektar
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif					
a. Pengaduan yang masuk tertangani	500 Pengaduan	500 Pengaduan	500 Pengaduan	1.000 Pengaduan	1.250 Pengaduan
b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	500 Izin	300 Izin*	500 Izin	600 Izin	650 Izin
c. Penerapan Sanksi adminitrasi	45 Sanksi	70 Sanksi	70 Sanksi	70 Sanksi	100 Sanksi
2. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup					
a. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan	10 Gugatan
b. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	15 Kesepakatan	54 Kesepakatan	56 Kesepakatan	45 Kesepakatan	20 Kesepakatan
3. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	3.000.000 Hektar	2.389.000* Hektar	4.000.000 Hektar	5.000.000 Hektar	2.675.000 Hektar
4. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
a. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	88 Kasus P-21	88 Kasus P-21	75 Kasus P-21	75 Kasus P-21	125 Kasus P-21
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya					
a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70 Poin	70 Poin	75 Poin	76 Poin	78 Poin

* Output Pagu Selfblocking TA 2016

Tabel. 8 - Distribusi Target Per Output Per Satuan Kerja Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

OUTPUT	PUSAT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAPUA
a. Pengaduan yang masuk tertangani	375 Pengaduan	250 Pengaduan	225 Pengaduan	150 Pengaduan	110 Pengaduan	90 Pengaduan
b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	265 Izin	125 Izin	100 Izin	75 Izin	60 Izin	25 Izin
c. Penerapan Sanksi adminitrasi	100 Sanksi	-	-	-	-	-
d. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	-	-
e. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	7 Gugatan	-	-	-	-	-
f. Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum	3 Gugatan	-	-	-	-	-
g. Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	20 Kesepakatan	-	-	-	-	-
f. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	320.000 Hektar	675.000 Hektar	499.000 Hektar	450.000 Hektar	375.000 Hektar	350.000 Hektar
g. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000 Hektar	-	1.000 Hektar	-	-	-
h. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	7 P-21	35 P-21	15 P-21	33 P-21	22 P-21	10 P-21
i. Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	1 P-21	-	2 P-21	-	-	-

Tabel. 9 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2019**

Rp. 35.028.400.000,-

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI	Output Kegiatan		Output Direktorat	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin	Rp.159.901.932.000,-	1 Layanan	Rp. 2.228.400.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	1200 Pengaduan	Rp.19.556.520.000	375 Pengaduan	Rp.6.300.000.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	650 Izin	Rp. 18.712.320.000	265 Izin	Rp.6.000.000.000,-
• Penerapan Sanksi Administratif	100 Sanksi	Rp. 5.500.000.000	100 Sanksi	Rp. 5.500.000.000,-
• Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	100 Perusahaan	Rp. 3.000.000.000	50 Perusahaan	Rp.2.000.000.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	6 Lokasi	Rp. 18.000.000.000	1 Lokasi	Rp.13.000.000.000,-

Tabel. 10 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

Rp. 18.841.273.000,-

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	Output Kegiatan		Output Direktorat	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin	Rp.159.901.932.000,-	1 Layanan	Rp.1.994.050.000,-
• Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	7 Gugatan	Rp. 7.916.667.000,-	7 Gugatan	Rp. 7.916.667.000,-
• Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	20 Perkara	Rp. 5.858.556.000,-	20 Perkara	Rp. 5.858.556.000,-
• Gugatan Perdata Lingkungan Hidup terkait DAS CITARUM melalui Pengadilan	3 Gugatan	Rp. 3.000.000.000	3 Gugatan	Rp. 3.000.000.000



Tabel. 11 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2019

Rp. 33.805.480.000,-

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Output Kegiatan		Output Direktorat	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin	Rp.159.901.932.000,-	1 Layanan	Rp.. 2.355.480.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	2.669.000 Hektar	Rp.61.954.567.000,-	320.000 Hektar	Rp. 18.001.163.000,-
• Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	6.000 Hektar	Rp. 5.081.160.000,-	5000 Hektar	Rp. 3.581.160.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	6 Lokasi	Rp. 67.200.000.000,-	1 Lokasi	Rp.9.867.677.000,-



Tabel. 12 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PAGU ANGGARAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

Rp. 17.055.998.000,-

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Output Kegiatan		Output Direktorat	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin	Rp.159.901.932.000,-	1 Layanan	Rp. 2.094.779.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	122 Kasus (P-21)	Rp. 51.481.219.000,-	7 Kasus (P-21)	Rp. 9.011.219.000,-
• Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	3 Kasus	Rp. 1.400.000.000,-	1 Kasus	Rp. 700.000.000,-
• Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK	6 Lokasi	Rp.15.000.000.000	1 Lokasi	Rp. 5.250.000.000,-



Tabel. 13 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2019**

Rp. 46.633.285.000,-

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK	Output Kegiatan		Output SeDitJen Gakkum	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen GAKKUM LHK	78 Poin	Rp.159.901.932.000	78 Poin	Rp.46.633.285.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan	Rp.6.000.000.000,-	1 Layanan	0
Layanan Sarana Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 3.500.000.000,-	1 Layanan	Rp. 3.500.000.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	Rp. 15.800.000.000	1 Layanan	Rp. 15.800.000.000,-
Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp.134.601.932.000,-	1 Layanan	Rp.27.333.285.000,-



Tabel. 14 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sumatera

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA**

Rp. 73.424.432.000,-

BPPH LHK Wilayah Sumatera	Output UPT	
	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Rp.27.374.432.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	675.000 Hektar	Rp.10.417.677.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi	Rp.12.082.323.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	250 Pengaduan	Rp.4.000.000.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	125 Izin	Rp.3.750.000.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi	Rp.1.250.000.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	35 P-21	Rp.12.000.000.000,-
• Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lokasi	Rp.2.550.000.000,-

Tabel. 15 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA**

Rp. 61.862.516.000,-

BPPH LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara	Output UPT	
	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	Rp.23.812.516.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	499.000 Hektar	Rp.9.000.000.000,-
• Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	1000 Hektar	Rp.1.500.000.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi	Rp.10.000.000.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	225 Pengaduan	Rp.3.800.000.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	100 Izin	Rp.2900.000.000,-
• Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	50 Perusahaan	Rp.1.000.000.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi	Rp.1.750.000.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	15 P-21	Rp.5.550.000.000,-
• Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	2 P-21	Rp.700.000.000,-
• Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lokasi	Rp.1.850.000.000,-

Tabel. 16 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Kalimantan

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**

Rp. 60.440.151.000,-

BPPH LHK Wilayah Kalimantan	Output UPT	
	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	Rp.20.740.151.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	450.000 Hektar	Rp.10.000.000.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi	Rp.10.000.000.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	150 Pengaduan	Rp.2.400.000.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	75 Izin	Rp.2.500.000.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi	Rp.750.000.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	33 P-21	Rp.11.500.000.000,-
• Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lokasi	Rp.2.550.000.000,-

Tabel. 17 - Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sulawesi

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SULAWESI**

Rp. 52.870.693.000,-

BPPH LHK Wilayah Sulawesi	Output UPT	
	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	Rp.17.863.446.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	375.000 Hektar	Rp. 7.750.727.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi	Rp.12.750.000.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	110 Pengaduan	Rp.1.756.520.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	60 Izin	Rp.2.000.000.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi	Rp.750.000.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	22 P-21	Rp. 8.450.000.000,-
• Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lokasi	Rp.1.550.000.000,-

Tabel. 18- Target dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan BPPH LHK Wilayah Maluku Papua

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA**

Rp.43.672.713.000,-

BPPH LHK Wilayah Maluku Papua	Output UPT	
	Target	Anggaran
• Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	Rp.14.805.393.000,-
• Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	350.000 Hektar	Rp. 6.785.000.000,-
• Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi	Rp.12.500.000.000,-
• Pengaduan yang masuk tertangani	90 Pengaduan	Rp.1.300.000.000,-
• Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	25 Izin	Rp.1.562.320.000,-
• Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi	Rp. 500.000.000,-
• Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	10 P-21	Rp. 4.970.000.000,-
• Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Lokasi	Rp.1.250.000.000,-

Tabel. 19 - Perjanjian Kinerja Menteri LHK dengan Dirjen Penegakan Hukum LHK Tahun Anggaran 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkedudukan di bawah ini :

Nama : Dr. RASID RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITE NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan tidak berjenjang, implementasi rencana kerja atau monitoring dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

 Dr. Ir. SITE NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

 Dr. RASID RIDHO SANI, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Selesai penangan dan lingkungan sesuai prosedur terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketepatan penanganan dan lingkungan terkait penanganan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	650 unit
2.	Meningkatnya hak Hak Negara atas Produk Hasil Hutan	Jumlah penyelesaian kasus sengketa PZT perkebunan, perhutanan dan peredaran illegal TGL	128 kasus (7-21)
3.	Meningkatkan kawasan hutan termasuk kawasan konservasi yang dapat dilindungi dari gangguan kemasyarakatan hutan	Sekolah unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan kemasyarakatan hutan	2.575.000 Ha

- No. Program/ Kegiatan Anggaran (x Rp.1000,-)
1. Penanganan Pengabdian, Pengawasan, dan Sertifikasi Administrasi
 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)
 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Pencegahan dan Pemertanian Hutan
 5. Ombudsman Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 442.624.942

Jakarta, Desember 2018

MENTERI
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Dr. Ir. SITE NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN

 Dr. RASID RIDHO SANI, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018



Dokumen ini dapat di unduh melalui tautan:



<http://bit.ly/RENJAGAKKUM2019>

**W e b s i t e :
h t t p : / / g a k k u m . m e n l h k . g o . i d /**



K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n